

**EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI KEGIATAN  
PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI DESA BORG0 KECAMATAN  
TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA**

**VERONICA HILLERY VIOREN SYAMSUDIN**

**FEMMY M.G TULUSAN**

**VERY Y. LONDA.**

**Abstrak :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalu Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan Di Desa Borgo Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik wawancara dengan informan, teknik observasi ke lokasi penelitian dan teknik dokumentasi hasil penelitian yang ada. Pada penelitian ini, menggunakan Teknik Analisis data dari Ricki W. Griffin (2012), mengenai penilaian efektivitas Program KUR dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur menggunakan lima aspek yaitu Aspek ketepatan sasaran program, Aspek ketepatan waktu, aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, aspek ketepatan beban kredit, aspek ketepatan prosedur. Program KUR bagi masyarakat nelayan merupakan upaya pemerintah guna memberdayakan masyarakat karena disinyalir masih banyak masyarakat nelayan yang belum menikmati program tersebut. Masyarakat nelayan Desa Borgo merupakan masyarakat yang berlokasi di pesisir Selatan laut Sulawesi dimana mata pencahariannya menggantungkan pada sektor perikanan sebagai nelayan tradisional, pemberdayaan adalah salah satu konsep di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau kualitas perekonomian.

**Kata Kunci :** Efektivitas Program; Kredit Usaha Rakyat; Pemberdayaan; Masyarakat Nelayan.

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multi dimensi karena cukup beragam sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh dan bukan solusi secara parsial harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Indonesia yang sebageian besar wilayah berada di pesisir dan memiliki potensi kelautan yang cukup besar seharusnya mampu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya terutama dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan peotensi kelautan yang dimilikinya.

Namun pada kenyataannya kehidupan masyarakat pesisir selalu dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan ini masyarakat pesisir sering di identikkan dengan kemiskinan. Kesulitan untuk melepaskan diri dari belunggu kemiskinan karena mereka didera

oleh beberapa keterbatasan di bidang kualitas sumber daya manusia, akses dan penguasaan teknologi, pasar dan modal. Kebijakan dan implementasi program – program pembangunan untuk masyarakat nelayan hingga saat ini dapat dikatakan masih belum optimal dalam memutus mata rantai belunggu kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Kusnadi, 2017).

Masyarakat nelayan Desa Borgo Kecamatan Tombariri merupakan masyarakat yang berlokasi di pesisir selatan laut Sulawesi dimana mata pencahariannya menggantungkan pada sektor perikanan sebagai nelayan tradisional dan cara menjalankannya juga masih dilakukan secara tradisional, pemberdayaan adalah salah satu konsep di dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Kebijakan pemberian bantuan modal usaha melalui KUR merupakan hal yang cukup tepat untuk meningkatkan kualitas

pendapatan ikan para nelayan. Program seperti itu, memang bertujuan untuk memandirikan nelayan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan kepada nelayan dan termasuk dengan memberikan mereka zona khusus bagi nelayan untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Pendampingan, evaluasi dan bantuan seperti itu, diyakini akan berdampak besar bagi ekonomi nelayan.

Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sektor pertanian, sektor perindustrian dan lain – lain. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan – persoalan yang ada dimasyarakat nelayan sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sektor perekonomian lain dan hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama antar lembaga yang ada baik lembaga yang ada dilingkungan pemerintahan ataupun non pemerintahan. Pendekatan kelembagaan sebagai basis dalam kegiatan pemberdayaan memiliki beberapa keuntungan dalam hal memperbesar kemampuan sumber daya dan meningkatkan skala usaha ekonomi kolektif yang dimiliki masyarakat. Demikian pula dengan peningkatkan posisi tawar kolektif dalam mengakses modal, pasar, teknologi dan kebijakan. Mengembangkan kemampuan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi kolektif untuk mendukung dinamika ekonomi kawasan dan Memudahkan pengontrolan terhadap perjalanan ekonomi bersama (Kusnadi, 2017).

Berbagai upaya dan kebijakan telah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi permasalahan perekonomian atau peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dalam pelaksanaannya

melibatkan lembaga perbankan seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri serta Bank Swasta lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga bekerja sama dengan lembaga permodalan lainnya yang mendapatkan izin dari pemerintah. Program KUR bagi masyarakat nelayan merupakan upaya pemerintah guna memberdayakan masyarakat karena disinyalir masih banyak masyarakat nelayan yang belum menikmati program tersebut.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan ini tergolong kompleks, dimulai dari kemiskinan yang turun temurun, rendahnya pendidikan, tidak adanya pengetahuan keterampilan, permodalan, akses kelembagaan dan sebagainya sehingga semakin menghambat mobilitas masyarakat nelayan untuk dapat berkembang. Kebijakan pemberian bantuan modal usaha melalui KUR merupakan hal yang cukup tepat untuk meningkatkan kualitas pendapatan ikan para nelayan. Program seperti itu, memang bertujuan untuk memandirikan nelayan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan kepada nelayan dan termasuk dengan memberikan mereka zona khusus bagi nelayan untuk melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Pendampingan, evaluasi dan bantuan seperti itu, diyakini akan berdampak besar bagi ekonomi nelayan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang dilakukan oleh Gilberth Rios Deo Jacub Pondaag, Gustaaf Budi Tampi, Very Y. Londa (2021) menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipasi yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Sementara itu Kerin Vidiyanti Bobane, Florence Daicy

Lengkong, Very Y. Londa (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan, kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masih merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat sampoi saat ini. Frilia Feren Watung Martha Ogotan, Alden Laloma (2020) menjelaskan bahwa program pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan nelayan akan berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan hingga ketidakmampuan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan. Program pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan nelayan dapat berkaitan dengan pemberdayaan, pemberdayaan, dan perlindungan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dengan mendorong semangat kerja nelayan melalui kegiatan dan pendampingan dari program pemberdayaan seperti permodalan pendampingan, sosialisasi, bantuan peralatan dan motivasi kerja, serta pelatihan tenaga dan fasilitas.

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gie (dalam Budiani, 2017) menyatakan bahwa efektivitas adalah: "Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka pekerjaan orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya. Sedangkan menurut Gibson (dalam Pasolong, 2013:179) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Jadi semakin tinggi pencapaian sasaran melalui suatu kegiatan dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan semakin tinggi pula efektivitasnya." Sementara itu McDonald dan Lawton dalam Ratminto dan Winarsih (2010:174) menyatakan bahwa efektivitas

adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Selaras itu, definisi efektivitas menurut Mardiasmo (2016:232) adalah menggambarkan tingkai pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output (target atau result). Dimana efektivitas dalam definisi tersebut merupakan perbandingan antara hasil yang didapat dengan dampak yang akan dialami setelah implementasi suatu kebijakan atau program.

Henry, Brian dan White (dalam Wibawa, 2019: 65) mengemukakan beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program. yaitu: a. Waktu pencapaian b. Tingkat pengaruh yang diinginkan c. Perubahan perilaku masyarakat d. Pelajaran yang diperoleh e. Tingkat kesadaran masyarakat akan kemampuan dirinya. Dalam kaitannya dengan implementasi program maka Pasolog (2018 : 92) menjelaskan definisi program yaitu: "Program adalah kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Wahab (2021 : 28-29), salah satu substansi dari kebijakan adalah kebijakan sebagai suatu program, program merupakan suatu lingkup kegiatan pemerintah yang reratif khusus dan jelas batas batasnya. Dalam konteks program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang menyangkut pengesahan atau legislasi, pengorganisasian dan pengerahan atau penyediaan sumber-sumber daya. Program-program atau sub-sub program dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah.

Jones (2011:379) merumuskan efektivitas program diukur berdasarkan kriteriakriteria proses, penilaian dampak dan efektivitas biaya. Kettner, Moroney dan Martin (2008:262) menjelaskan bahwa suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kelima kriteria tersebut, yaitu: upaya/usaha (effort) yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, efisien biaya (cost efficiency) dari pelaksanaan program, hasil (result) dari pelaksanaan program dibandingkan dengan hasil yang ditetapkan sebelumnya, efektivitas biaya (cost effectiveness) program yaitu besaran biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan program dan dampak (impact) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dari pelaksanaan program.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif (Iskandar, 2010). Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta kerangka teori maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yang dapat mengukur efektivitas menurut Ricki W. Griffin (Ladzi Safroni, 2012) mengenai penilaian efektivitas program KUR dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur menggunakan lima aspek yaitu : 1. Aspek ketepatan sasaran program 2. Aspek ketepatan waktu 3. Aspek ketepatan jumlah uang yang diterima oleh nasabah, 4. Aspek ketepatan beban kredit 5. Aspek ketepatan prosedur. Data dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan di lokasi penelitian, melakukan wawancara kepada pelaksana program dan masyarakat nelayan serta mengumpulkan data sekunder. teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Borgo adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di Kecamatan Tombariri. Pemukiman penduduk yang terletak di pesisir pantai membuat sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Kegiatan usaha perekonomian dan perdagangan dengan mudah ditemui di wilayah Desa Borgo seperti mini market (alfamidi dan Indomart), Perbankan (BRI dan Bank SULUT), Penggadaian, Pasar Tradisional, Toko/Warung Sembako, Toko Bangunan, bahkan kios – kios kecil lainnya yang menawarkan jajanan yang sehat. Jumlah penduduk Desa Borgo tahun 2021 terdiri dari 545 KK yang terdiri dari 1857 Jiwa. Penduduk Laki – laki berjumlah 948 Jiwa dan Penduduk Perempuan berjumlah 909 Jiwa.

Berikut ini akan dibahas beberapa aspek yang menjadi fokus penelitian sehubungan dengan objek yang diteliti yaitu :

1. Ketepatan Sasaran. Ketepatan sasaran adalah keberhasilan dari tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai / tercapainya realisasi kredit yang telah ditentukan oleh Bank pelaksana. Ketepatan sasaran yang diharapkan pihak Bank adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat tepat guna (efektif). KUR bertujuan untuk membantu para nelayan tradisional dalam penyediaan modal usaha penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebab ditemukan beberapa nasabah yang menggunakan dana kredit untuk kebutuhan konsumtif. Namun sesuai hasil wawancara penulis dengan para nasabah KUR paling banyak mengatakan bahwa kredit yang kami dapat benar benar digunakan untuk modal kerja guna mengembangkan usaha sehingga dapat memberikan manfaat, mampu meningkatkan kapasitas para nelayan tradisional dalam mengembangkan usahanya.

2. Penetapan waktu penyaluran KUR  
Penetapan waktu penyaluran KUR merupakan sesuatu hal yang sangat krusial yang selalu dinanti - nantikan oleh para nasabah baik itu penetapan waktu dimulainya tahapan penyaluran sampai pada tahapan pencairan dana itu semua harus dilakukan secara tepat, kalau tidak maka akan menimbulkan gejala dikalangan para nasabah karena ketidak pastian. Dalam wawancara peneliti dengan beberapa nasabah atau kreditur KUR diketahui bahwa penyaluran KUR pada Bank BRI tidak dilaksanakan sesuai waktu sudah ditetapkan pemerintah karena tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu sehingga terkesan prosesnya dilakukan secara sembunyi - sembunyi. Jadi mereka yang sudah mendapat informasi awal mengenai penyaluran dana KUR itu yang lebih dahulu mendapatkannya sementara masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut tidak dapat memanfaatkan program KUR dengan alasan terlambat mengajukan permohonan sementara batas waktu yang ditetapkan sudah habis. Hal tersebut banyak dikeluhkan masyarakat karena pihak BRI tidak transparan dalam proses penyaluran KUR menjadikan program pemerintah tidak terlaksana secara efektif. Itu berarti diperlukan evaluasi kembali oleh pihak pemerintah terhadap efektivitas penyaluran dana KUR oleh Bank BRI.
3. Ketepatan Jumlah Uang Yang Diterima  
Jumlah uang pinjaman yang diterima dikatakan tepat apabila sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemohon berdasarkan kebutuhan usaha mereka. Penilaian besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit yang layak diberikan kepada si pemohon (Kasmir, 2012:144) dan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh fakta bahwa banyak nasabah yang mengeluh karena kredit yang dicairkan tidak sesuai dengan jumlah yang mereka ajukan.
4. Ketepatan beban Kredit Yaitu ketentuan yang disepakati oleh debitur terhadap kreditur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pembebanan kredit. Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam (debitur atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank sesuai dengan kesepakatan (kasmir, 2812 : 154). Penetapan beban kredit oleh pihak bank kepada nasabah sebagai kreditur menurut para informan yang penulis wawancarai dirasa sangat membebani para nasabah sebab jumlah penghasilan yang diperoleh para nelayan tidak mampu menutupi setoran setiap bulan.
5. Ketepatan prosedur Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. Menurut informan tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada atau dengan kata lain ada prosedur tertentu yang dilewati sehingga kreditur yang semestinya tidak layak mendapatkan kredit KUR tersebut tapi kenyataannya mereka menerima. Tahapan dalam prosedur pemberian kredit pada setiap bank pada umumnya tidaklah jauh berbeda, dimana setiap permohonan kredit dari calon debitur haruslah wajib dilakukan analisisnya untuk mendapat persetujuan kreditnya. Namun tahapan - tahapan pemberian kredit yang sudah ditetapkan pemerintah

sering dilanggar atau tidak dilakukan oleh karyawan Bank BRI fakta dilapangan menunjukkan bahwa penetapan seseorang untuk mendapatkan kredit tidak didasarkan pada prosedur akan tetapi lebih pada faktor kedekatan atau kenalan sehingga ada kesan timbang pilih sehingga proses yang semestinya dilalui mulai dari persiapan, analisis atau penilaian kredit, keputusan kredit, pelaksanaan dan administrasi kredit serta supervise kredit sudah tidak dilaksanakan sesuai prosedur tapi langsung ditetapkan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa aspek ketepatan sasaran Ketepatan sasaran adalah keberhasilan dari tujuan pelaksanaan yang ingin dicapai/tercapainya realisasi kredit yang sudah diprogramkan untuk memberdayakan masyarakat khususnya para nelayan tradisional dengan pemberian bantuan modal usaha melalui kredit KUR. Pemberian kredit KUR kepada nelayan khususnya di Desa Borgo Kecamatan Tombariri sudah dilaksanakan. Aspek ketepatan waktu Dari aspek ketepatan waktu penyaluran KUR bahwa memang terkadang masih mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena banyak para nelayan tradisional belum mengetahui prosedur pengurusan berkas yang diperlukan sehingga pihak bank harus menunggu kelengkapan berkas yang disiapkan oleh para kreditur, kalau sudah lengkap barulah kredit tersebut dapat diproses. Aspek ketepatan jumlah uang yang diterima Dana KUR yang diterima oleh kreditur melalui bank BRI dapat dikatakan tidak tepat atau tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan para nelayan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permohonan kredit yang diajukan sebesar Rp. 63 25.000.000 ( Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) namun yang disetujui hanya sebesar Rp.

10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) bahkan ada yang hanya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh petugas Bank BRI. Hal tersebut banyak dikeluhkan oleh para debitur karena mereka merasa bahwa apa yang mereka terima tidak sesuai dengan kebutuhan usaha yang mereka lakukan. Aspek ketepatan beban kredit Penetapan angsuran yang tinggi oleh Bank BRI menjadi keluhan para kreditur karena mereka merasa terbebani apalagi para nelayan yang penghasilannya tidak menentu karena faktor cuaca yang sering berubah – rubah terkadang melaut terkadang tidak itu sangat berpengaruh terhadap penghasilan para nelayan dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap penyeteroran cicilan mereka di Bank. Aspek ketepatan prasedur Prosedur pemberian kredit KUR yang dilakukan oleh Bank BRI dimaksudkan untuk mempermudah Bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit yaitu mulai dari persiapan kredit (credit preparation), analisis atau penilaian kredit (credit analysis), keputusan kredit (credit decision) sampai pada pelaksanaan dan administrasi kredit (credit supervision/ follow up).

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, maka Kepada pihak Bank BRI sebagai pelaksana program Kredit Usaha Rakyat atau KUR, disarankan agar bekerja secara professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat dengan mengikuti berbagai peraturan pelaksanaan KUR serta melakukan seleksi yang ketat terhadap para pemohon kredit sehingga program KUR yang dilaksanakan oleh Bank BRI dapat tepat sasaran. Kepada Bank BRI disarankan agar pelaksanaan program KUR dilakukan sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan membantu mempermudah para kreditur dalam pengurusan administrasi kredit yang menjadi persyaratan dalam mendapatkan kredit KUR.

Pemberian KUR kepada para pelaku usaha oleh Bank BRI disarankan untuk diberikan sesuai kebutuhan para pelaku usaha agar mereka dapat dijalankan atau mengelolah usaha secara maksimal dengan adanya kecukupan modal usaha yang mereka dapatkan. Dalam penetapan beban kredit kepada pihak kreditur diharapkan agar pihak Bank dapat mempertimbangkan aspek kemampuan kreditur dalam pembayaran angsuran serta memperhatikan kondisi usaha yang sementara atau sedang dijalankan dan juga kondisi eksternal lainnya. Kepada pihak Bank BRI juga disarankan agar dalam penyaluran KUR harus mengikuti prosedur yang ditetapkan agar tidak terjadi hal – hal yang dapat merugikan pihak kreditur yang mengajukan permohonan kredit kepada Bank BRI Dan seluruh kreditur harus mendapat perlakuan yang sama dalam pelayanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bobane. Kerin Vidiyanti Florence Daicy Lengkong, Very Y. Londa. 2018. Efektivitas Program Beras Sejahtera Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19251>
- Budiani. 2017. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran, Karang Taruna, Eka Taruna. *Bukti Jurnal Ekonomi Sosial*. 2 (1).
- Iskandar. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta: Gaung Persada Press (GP Press).
- Jones. 2011. Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal off Accounting Research*. 29 (2) 193 – 228.
- Kettner, P.M., Moroney, R.M dan Martin, L.L. 2008 *Designing and Managing Programsan Effectiveness-Based Approach*. London: Sage Publication.
- Kusnadi. 2017. *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : LKIS.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit. Andi
- Pasolang. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Pondaag, Gilberth. Tampi. G.B dan Londa. V.Y. 2021. Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa Di Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35075>.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya Media Publishing.
- Wahab. S.A. 2021. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Sinar Grafika.
- Watung. Frilia Feren, Martha Ogotan, Alden Laloma. 2020. Program Pemberdayaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/28362>
- Wibowo, 2019. *Kebijakan Publik, Proses Dan Analisis*. Jakarta : Intermedia